



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SUB UNIT KERJA : BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DYAH WIDIASTUTI**
2. Jabatan : **KASI SUMBERDAYA KEHUMASAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
3. NHK : **421913**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.137.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/38 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 215 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 537.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/125 m2 di CEMAHSARI XII / 332 RT. 04 RW. 04 Kode Pos. , AUSTRIA, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 169.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. 69.200.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 117.785.681**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

Sub Total Rp. 2.493.485.681

III. HUTANG Rp. 577.760.741**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.915.724.940



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.